

# **LAPORAN KEUANGAN**

## **UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018 SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022**



### ***Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur***

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Jalan Raya Karangploso KM. 4 Malang, Jawa Timur

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Malang, 31 Desember 2022

Kepala Balai,



Dr. Atekan, SP, MSi  
NIP. 197210061999031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.6. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
    - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENGKAJIAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188  
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255  
WEBSITE: <http://jatim.litbang.pertanian.go.id> e-mail: [btp-jatim@litbang.pertanian.go.id](mailto:btp-jatim@litbang.pertanian.go.id); [btpjatim@yahoo.com](mailto:btpjatim@yahoo.com)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 31 Desember 2022

Kepala Balai,



Dr. Atekan, SP, MSi

NIP. 197210061999031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 920,162,563 atau mencapai 126% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 730.269.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 13,917,895,842 atau mencapai 88% dari alokasi anggaran sebesar Rp 15,789,675,000,-

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 477,278,227,938 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 88,971,771; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 477,172,774,344; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp -98.427; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 16.580.250,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 477,182,391,216.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 819,022,050, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 17,887,796,105 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -17,068,774,055. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0 dan Defisit Rp-16,917,228,142 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16.917.228.142.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp481,217,408,201 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16,917,228,142 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-115,522,122 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 12,997,733,279 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp477,182,391,216.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	730,269,000	920,162,563	126	1,065,211,121
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>730,269,000</b>	<b>920,162,563</b>	<b>126</b>	<b>1,065,211,121</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	9,345,600,000	8,843,827,950	95	10,452,124,023
Belanja Barang	B.4.	6,419,075,000	5,053,255,392	79	18,953,370,203
Belanja Modal	B.5.	25,000,000	20,812,500	83	15,000,000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>15,789,675,000</b>	<b>13,917,895,842</b>	<b>88</b>	<b>29,420,494,226</b>



## II. NERACA

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.809,	1.809	0	0,00
Piutang Bukan Pajak	64.548.480,	64.548.480	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(6.454.848,)	(6.454.848)	0	0,00
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>58.093.632,</b>	<b>58.093.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Persediaan	30.876.330,	192.911.100	(162.034.770)	(83,99)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>88.971.771,</b>	<b>251.006.541</b>	<b>(162.034.770)</b>	<b>(64,55)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	445.510.745.332,	445.510.745.332	0	0,00
Peralatan dan Mesin	24.192.618.609,	24.693.688.072	(501.069.463)	(2,03)
Gedung dan Bangunan	37.530.991.000,	37.530.991.000	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.523.256.100,	3.523.256.100	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	349.257.083,	358.734.083	(9.477.000)	(2,64)
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(33.934.093.780,)</b>	<b>(30.652.587.927)</b>	<b>(3.281.505.853)</b>	<b>10,71</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>477.172.774.344,</b>	<b>480.964.826.660</b>	<b>(3.792.052.316)</b>	<b>(0,79)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(98,427)	0	(98,427)	0
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)</b>	<b>(98,427)</b>	<b>0</b>	<b>(98,427)</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>(98,427)</b>	<b>0</b>	<b>(98,427)</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	2.250.000,	8.365.000	(6.115.000)	(73,10)
Aset Lain-lain	537.473.963,	509.144.500	28.329.463	5,56
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(523.143.713,)</b>	<b>(515.934.500)</b>	<b>(7.209.213)</b>	<b>1,40</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>16.580.250,</b>	<b>1.575.000</b>	<b>15.005.250</b>	<b>952,71</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>477,278,227,938</b>	<b>481.217.408.201</b>	<b>(3.939.081.836)</b>	<b>(0,82)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Hibah Yang Belum Disahkan	95.836.722,	0	95.836.722	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>95.836.722,</b>	<b>0</b>	<b>95.836.722</b>	

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2022

<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>95.836.722,</b>	<b>0</b>	<b>95.836.722</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	477,182,391,216	481.217.408.201	(4.034.918.558)	(0,84)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>477,182,391,216</b>	<b>481.217.408.201</b>	<b>(4.034.918.558)</b>	<b>(0,84)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>477,278,227,938</b>	<b>481.217.408.201</b>	<b>(3.939.081.836)</b>	<b>(0,82)</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	819,022,050	1.024.131.250
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>819,022,050</b>	<b>1.024.131.250</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	8,843,827,950	10.452.124.023
Beban Persediaan	D.3.	911,491,610	3,559,692,335
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,875,344,253	5.830.376.050
Beban Pemeliharaan	D.5.	763,149,939	875,996,576
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	696,024,360	3.515.984.292
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	5,129,024,850
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	3,797,859,566	3,806,289,685
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	98,427	-3.502.517
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>17,887,796,105</b>	<b>33,165,985,294</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>17,068,774,055</b>	<b>-32,141,854,044</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	26,510,000	2.070.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.		0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	125,035,913	3.984.703
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.		0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>151,545,913</b>	<b>6.054.703</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-16,917,228,142</b>	<b>-32,135,799,341</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	481,217,408,201	487,341,332,113
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	(16,917,228,142)	(32,135,799,341)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	(115,522,122)	(2,343,407,676)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0	(74,585,316)
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	(2,268,822,360)
<b>LAIN-LAIN</b>		(115,522,122)	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	12,997,733,279	28,355,283,105
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	(4,035,016,985)	481,217,408,201
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>477,182,391,216</b>	<b>481,217,408,201</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

##### TUGAS

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

##### FUNGSI

- a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana berita, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- d. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- e. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknik materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi.
- g. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- h. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- i. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

##### Kebijakan Mutu

BPTP Jawa Timur memiliki visi untuk “Menjadi Balai Berkelas Dunia” dan berkomitmen secara konsisten menerapkan kebijakan mutu serta melakukan peningkatan keberlanjutan melalui:

1. Mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku berhubungan dengan kegiatan BPTP Jawa Timur.
2. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi.
3. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi sumber daya dan sarana/prasarana BPTP Jawa Timur.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dan diseminasi teknologi.
5. Melakukan peninjauan ulang secara berkala sistem manajemen mutu untuk melakukan peningkatan berkelanjutan. Kebijakan mutu terbuka bagi umum dan ditinjau kesesuaiannya secara berkala dengan sistem manajemen mutu BPTP Jawa Timur.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	12,116,000	12,116,000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	258,081,000	258,081,000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	460,072,000	460,072,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>730,269,000</b>	<b>730,269,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.772.000.000	9,146,800,000
Belanja Lembur	198.800.000	198,800,000
Belanja Barang Operasional	1,846,760,000	1,859,560,000
Belanja Barang Non Operasional	3,895,866,000	1,218,776,000
Belanja Barang Persediaan	4,440,203,000	983,021,000
Belanja Jasa	1,670,010,000	391,988,000
Belanja Pemeliharaan	637,070,000	687,070,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,200,700,000	1,278,660,000
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	3,362,280,000	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,437,720,000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,000,000	25,000,000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>32,561,409,000</b>	<b>15,789,675,000</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp920,162,563 atau mencapai 126% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp730,269,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	258,081,000	309,997,000	120
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	74,630,513	0
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	12,116,000	44,813,350	369
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	460,072,000	490,721,700	106
<b>Jumlah</b>	<b>730,269,000</b>	<b>920,162,563</b>	<b>126</b>

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	309,997,000	324.164.000,00	
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	74,630,513	35.025.168,00	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	44,813,350	12.069.500,00	
Pendapatan Denda	0	4.613.850,00	
Pendapatan Lain-Lain	0	3.984.703,00	
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	490,721,700	685.353.900,00	
<b>Jumlah</b>	<b>920,162,563</b>	<b>1.065.211.121,00</b>	<b>-16</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp13.917.895.842 atau 88% dari anggaran belanja sebesar Rp15.789.675.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2022

Uraian	2022
--------	------

Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	9,345,600,000	8.844.623.317	95
Belanja Barang	6,419,075,000	5,053,255,392	79
Belanja Modal	25,000,000	20,812,500	83
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>15,789,675,000</b>	<b>13,918,691,209</b>	<b>88</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>795.367</b>	
<b>Total Belanja</b>	<b>15,789,675,000</b>	<b>13,917,895,842</b>	<b>88</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 111% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan pagu anggaran dan kegiatan karena refocusing dan blokir anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Belanja Pegawai	8.843.827.950	10.452.124.023,00	
Belanja Barang	5,053,255,392	18.953.370.203,00	
Belanja Modal	20,812,500	15.000.000,00	
<b>Total Belanja</b>	<b>13,917,895,842</b>	<b>29.420.494.226,00</b>	<b>-111</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8,843,827,950 dan Rp10,452,124,023. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -18% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang purna tugas dan perpindahan pegawai ke BRIN

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8,732,268,317	10.375.272.248,00	
Belanja Lembur	112,355,000	114.889.000,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8,844,623,317</b>	<b>10.490.161.248,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>795,367</b>	<b>-38.037.225,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,843,827,950</b>	<b>10.452.124.023,00</b>	<b>-18</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5,053,255,392 dan Rp18,953,370,203. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar -275% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan pagu anggaran dan kegiatan karena refocusing dan blokir anggaran

#### Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,831,891,470	1.305.855.269,00	
Belanja Barang Non Operasional	693,680,092	3.515.720.590,00	
Belanja Barang Persediaan	795,063,665	3.841.099.385,00	
Belanja Jasa	349,772,691	1.008.800.191,00	
Belanja Pemeliharaan	686,823,114	636.885.626,00	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	696,024,360	3.515.984.292,00	
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	3.800.784.850,00	
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	1.328.240.000,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5,053,255,392</b>	<b>18.953.370.203,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5,053,255,392</b>	<b>18.953.370.203,00</b>	<b>-275</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20,812,500 dan Rp15.000.000. Belanja modal



merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 39% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan pagu anggaran belanja modal

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,812,500	15.000.000,00	39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>20,812,500</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>39</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20,812,500</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>39</b>

#### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.812.500 dan Rp15.000.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 39% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Kenaikan pagu anggaran belanja modal

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,812,500	15.000.000,00	39
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>20,812,500</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>39</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20,812,500</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>39</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.809,00 dan Rp1.809,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022
Sisa kas hibah langsung luar negeri	1.809,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.809,00</b>

#### C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp64.548.480,00 dan Rp64.548.480,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

#### Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	64.548.480,00	64.548.480,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.548.480,00</b>	<b>64.548.480,00</b>

#### C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

#### Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022

No	Nama Debitur	31 Desember 2022
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

#### C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-6.454.848,00 dan Rp-6.454.848,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	64.548.480	10%	6.454.848
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

#### C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR  
per 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

#### C.1.6. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30,876,330 dan Rp192,911,100. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	6.649.205	14.947.000
Bahan untuk Pemeliharaan	16.881.925	40.618.200
Bahan Baku	6.936.600	136.664.150
Persediaan Lainnya	408.600	528.600
<b>Jumlah</b>	<b>30.876.330</b>	<b>192.911.100</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp445.510.745.332,00 dan Rp445.510.745.332,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>445.510.745.332,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>445.510.745.332,00</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24,192,618,609 dan Rp24,693,688,072. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>24,693,688,072</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	20,812,500

Reklasifikasi Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(521,881,963)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>24,192,618,609</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(22,741,550,581)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>1.451.068.028</b>

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37.530.991.000,00 dan Rp37.530.991.000,00.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.523.256.100,00 dan Rp3.523.256.100,00.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp349,257,083 dan Rp358,734,083

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-33.934.093.780 dan Rp-30.652.587.927.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24,192,618,609	(22,741,550,581)	1.451.068.028

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
2.	Gedung dan Bangunan	37,530,991,000	(9,824,611,346)	27.706.379.654
3.	Jalan dan Jembatan	1,846,285,000	(1,082,889,220)	763.395.780
	Irigasi	1,637,144,500	(267,568,390)	1.369.576.110
	Jaringan	39,826,600	(17,474,243)	22.352.357
4.	Aset Tetap Lainnya	349,257,083	0	349.257.083
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>65.596.122.792</b>	<b>(33,934,093,780)</b>	<b>31.662.029.012</b>

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2,250,000 dan Rp8.365.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00
Paten	2.250.000,00
Software	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000,00</b>

##### C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp537,473,963 dan Rp509.144.500,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur serta dalam proses penghapusan dari BMN.

##### C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(523,143,713) dan Rp(515,934,500).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	2,250,000	-787,500	1.462.500
2.	Aset Lain-lain	537,473,963	-522.356.213	15.117.750
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>539.723.963</b>	<b>-523,143,713</b>	<b>16.580.250</b>

## C.6. EKUITAS

### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp477,182,391,216 dan Rp481,217,408,201. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp819,022,050 dan Rp1.024.131.250,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	4.613.850,00	
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	167,009,200	206.128.900,00	
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	312,500	0,00	
Pendapatan Pendidikan Lainnya	0,00	300.000,00	
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2,211,000	0,00	
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	323,400,000	478.925.000,00	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8,690,000	1.015.000,00	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	309,997,000	324.164.000,00	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,402,350	8.984.500,00	
<b>Jumlah</b>	<b>819,022,050</b>	<b>1.024.131.250,00</b>	<b>-25</b>

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 8,843,827,950 dan Rp 10,452,124,023. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai



per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5,764,621,360	6.611.084.522,00	
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-367		
Beban Pembulatan Gaji PNS	75,213	85.181,00	
Beban Tunj. Anak PNS	115,820,786	133.260.510,00	
Beban Tunj. Beras PNS	306,119,340	347.905.680,00	
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,164,530,000	1.570.880.000,00	
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-795,000		
Beban Tunj. PPh PNS	87,480,818	119.246.040,00	
Beban Tunj. Struktural PNS	8,820,000	17.460.000,00	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	402,708,800	454.326.690,00	
Beban Tunjangan Umum PNS	133,790,000	152.534.800,00	
Beban Uang Lembur	112,355,000	114.889.000,00	
Beban Uang Makan PNS	748,302,000	930.451.600,00	
<b>Jumlah</b>	<b>8,843,827,950</b>	<b>10.452.124.023,00</b>	<b>-18</b>

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp911,491,610 dan Rp3,559,692,335. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	418,545,970	2.554.822.635,00	
Beban Persediaan konsumsi	492,825,640	714.653.120,00	
Beban persediaan lainnya	120,000	290.021.180,00	
<b>Jumlah</b>	<b>911,491,610</b>	<b>3.559.692.335,00</b>	<b>-291</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2,875,344,253 dan Rp5.830.376.050,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Bahan	94,469,500	148.867.000,00	
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		1.811.967.350,00	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	579,210,592	1.208.086.240,00	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12,789,000	99.843.000,00	
Beban Barang Operasional Lainnya	46,510,000	48.000.000,00	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	169,204,000	186.560.000,00	
Beban Honor Output Kegiatan	20,000,000	346.800.000,00	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,112,960	567.926.800,00	
Beban Jasa Lainnya	19,412,255	34.194.225,00	
Beban Jasa Profesi		18.055.000,00	
Beban Keperluan Perkantoran	1,603,388,470	971.452.269,00	
Beban Langganan Air	2,802,910	2.798.800,00	
Beban Langganan Listrik	313,119,724	341.440.566,00	
Beban Langganan Telepon	12,324,842	14.029.800,00	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		0,00	
Beban Sewa		30.355.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>2,875,344,253</b>	<b>5.830.376.050,00</b>	<b>-103</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp763,149,939 dan

Rp875,996,576. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	377,459,410	342.479.166,00	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya		0,00	
Beban Pemeliharaan Irigasi		0,00	
Beban Pemeliharaan Jaringan		0,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	309,363,704	294.406.460,00	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	75,426,825	164.697.400,00	
Beban Persediaan suku cadang	900,000	74.762.100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>763,149,939</b>	<b>876.345.126,00</b>	<b>-15</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp696,024,360 dan Rp3.515.984.292,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	695,524,360	1.389.542.605,00	
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.053.851.687,00	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	72.590.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>696,024,360</b>	<b>3.515.984.292,00</b>	<b>-405</b>

#### D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.129.024.850,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	3.800.784.850,00	0,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.328.240.000,00	0,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	-100,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	-100,00
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	-100,00
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>5.129.024.850,00</b>	<b>-41,38</b>

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3,797,859,566 dan Rp3,806,289,685. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	112,500	112.500,00	
Beban Amortisasi Software		0,00	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,048,540,542	1.721.380.585,00	
Beban Penyusutan Irigasi	56,033,649	56.225.565,00	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	243,282,085	243.282.086,00	
Beban Penyusutan Jaringan	1,243,165	1.243.165,00	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,352,375	0,00	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,447,295,250	1.707.665.903,00	
<b>Jumlah</b>	<b>3,797,859,566</b>	<b>3.806.289.685</b>	<b>-0,2</b>

**D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp98,427 dan Rp-3.502.517. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	98.427	-3.502.517,00	
<b>Jumlah</b>	<b>98.427</b>	<b>-3.502.517,00</b>	

**D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset		0,00	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		0,00	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	94,315,913	0,00	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		0,00	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	30,720,000		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	26,510,000	2.070.000,00	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		3.984.703,00	
<b>Jumlah</b>	<b>151,545,913</b>	<b>6.054.703,00</b>	<b>2402</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp481,217,408,201 dan Rp487.341.332.113.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-16,917,228,142 dan Rp-32,135,799,341. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-115.522.122 dan Rp-2.343.407.676.

#### E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-74.585.316,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

#### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2.268.822.360,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Peralatan dan Mesin	0
Tanah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.997.733.279,00 dan Rp28.355.283.105,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	13,917,895,842
Diterima dari Entitas Lain	-920,162,563
<b>Jumlah</b>	<b>12,997,733,279</b>

##### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-920.162.563,00 sedangkan DKEL sebesar Rp13.917.895.842,00.

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp477.182.391.216,00 dan Rp481.217.408.201,00.



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### Penanganan Pandemi Covid-19 dengan akun covid

AKUN	NM AKUN	REVISI DIPA	BELANJA	SISA	PENGUNAAN BELANJA *Merujuk pada SE DJPB.0369_2020
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12.800.000	12.789.000	11.000	Vitamin dan penambah daya tahan tubuh
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.200.000	2.112.960	87.040	Jasa antigen / rapid test
		15.000.000	14.901.960	98.040	

#### Revisi DIPA

Kode	Deskripsi	DIPA Awal	Rev-1	Rev-2	Rev-3	Rev-4	Rev-5	Rev-6	Rev-7
		32.561.409.000	32.561.409.000	32.561.409.000	18.261.409.000	16.932.427.000	16.877.647.000	17.038.275.000	15.789.675.000
018.09.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	16.677.109.000	16.677.109.000	16.677.109.000	2.377.109.000	2.527.109.000	2.472.329.000	2.527.109.000	2.427.109.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	15.884.300.000	15.884.300.000	15.884.300.000	15.884.300.000	14.405.318.000	14.405.318.000	14.511.166.000	13.362.566.000

#### Perbedaan pendapatan LO dan LRA

#### PERBANDINGAN PENDAPATAN dari LAPORAN OPERASIONAL vs LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Akun	Uraian	LO	LRA
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.402.350	7.402.350
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2.211.000	2.211.000
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	8.690.000	8.690.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	309.997.000	309.997.000
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	312.500	312.500
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	167.009.200	167.009.200
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan	323.400.000	323.400.000
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga		74.630.513
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		26.510.000
<b>JUMLAH</b>		<b>819.022.050</b>	<b>920.162.563</b>

Penjelasan : Perbedaan karena pada Laporan LO tidak mencatat setoran TGR dan lelang BMN, sebaliknya pada Laporan LRA mencatat transaksi tersebut.

**Perbedaan beban persediaan pada LO dengan pemakaian persediaan**

	<b>LO</b>	<b>Pemakaian Persediaan</b>
Beban persediaan	911.491.610	
Barang konsumsi		418.545.970
Bahan untuk pemeliharaan		75.426.825
Bahan baku		492.825.640
Bahan persediaan lainnya		120.000
	<b>911.491.610</b>	<b>986.918.435</b>
Penjelasan, pada LO tidak mencatat persediaan bahan untuk pemeliharaan	75.426.825	

## Hibah Luar Negeri Tahun 2020

Tahapan proses :

1. Hibah uang luar negeri ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research) tahun 2018-2020, sudah dilakukan pengesahan tahun 2018 dan tahun 2019.
2. Tahun 2020 menerima transfer hibah uang sebesar Rp. 95.834.913,- dan sudah realisasi belanja.
3. Saldo hibah tahun 2019 sebesar Rp. 1.809,- dan sudah dituangkan dalam neraca laporan keuangan dalam kas lainnya dan setara kas.
4. Sudah dilakukan pengajuan revisi DIPA hibah pada tahun 2020 ke Kanwil DJPB provinsi Jawa Timur di Surabaya namun terdapat penolakan karena terkendala kelengkapan berkas form daftar sisa PHLN yang harus ditandatangani oleh Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah di Jakarta dan terkendala batasan waktu revisi DIPA.
5. Telah dilakukan revisi DIPA dan terbit tanggal 10 Februari 2021 untuk tahun anggaran 2020, namun pertanggungjawaban SP2HL / SPHL belum diajukan ke KPPN Khusus Hibah dan Pinjaman di Jakarta karena pengajuan tersebut menunggu revisi DIPA terbit sedangkan batas waktu pengajuan SP2HL/SPHL telah berakhir.
6. Pada tahun anggaran 2022, dilakukan pengesahan SP2HL/SPHL sesuai Surat DJP No. S-876/PB/2020 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu dan Petunjuk Teknis Penatausahaan Transaksi Hibah Kas pada aplikasi Sakti.
7. Proses usulan pengesahan masih terdapat kendala karena aplikasi Sakti masih dilakukan penyempurnaan oleh pihak pengembang.
8. Setelah melalui tahapan penyempurnaan aplikasi Sakti dan perpanjangan waktu administratif terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022, pengesahan SP2HL/SPHL dapat dilakukan.
9. SP2HL No. 00486T/567364/2022  
SPHL No. 231400505640001  
Tanggal SPHL : 31-12-2022  
Tanggal selesai : 10-02-2023  
Pendapatan : Rp. 95,836,722  
Belanja : Rp. 95,836,722  
No Register : 2HJ9J1NA  
KPPN : 140 Khusus Pinjaman dan Hibah